

SISTEM INFORMASI PELAYANAN MASYARAKAT PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

¹Fika Mirantika,²Untoro Apsiswanto, ³Tri Aristi Saputri
¹²³ STMIK Dharma Wacana Metro
¹Mirantikafika@gmail.com

ABSTRAK

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dalam memberikan pelayanan pertanahan pada masyarakat baik dalam pembuatan sertifikat maupun administrasi lainnya. Dengan sistem informasi yang berjalan pada saat ini masih belum berjalan secara baik, hal ini dapat dilihat pada lambatnya penanganan proses pendaftaran sertifikat yang disebabkan tidak digunakannya basisdata pada sistem yang digunakannya, tidak digunakannya basisdata juga dapat menyebabkan data sertifikat ganda yang sering terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, maka dibutuhkan suatu solusi untuk membantu BPN Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat dalam mengelola pertanahan. Dengan menggunakan program aplikasi berbasisdata sehingga proses pendaftaran sertifikat dapat berlangsung cepat dan tanpa kesalahan. Penulis menggunakan Metode penelitian ilmiah jenis deskriptif, dan desain penelitian jenis studi kasus serta metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi pustaka. Model pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall menggunakan metode pendekatan terstruktur dengan alat bantu flowmap, Diagram Konteks, DFD dan kamus data. Untuk dapat memberikan solusi pada Sistem yang berjalan dimana perbaikan dilakukan pada basis data untuk mempermudah pihak BPN Kabupaten Lampung Tengah melakukan pengelolaan data sertifikat. Untuk pengembangan perangkat lunak menggunakan web dengan localhost server Hasil dari penelitian adalah sistem informasi pengelolaan sertifikat menggunakan basisdata sehingga pencarian data menjadi lebih mudah, basisdata juga dapat meminimalkan kesalahan pengguna, serta pembuatan laporan menjadi lebih efisien yang dapat diakses secara cepat. Kekurangan dari penelitian ini adalah belum online, sedangkan kelebihanannya adalah telah tercapainya semua tujuan dan batasan yang ditetapkan.

Kata Kunci: Sistem Informasi Pengelolaan Sertifikat, Basisdata, Model Pengembangan Waterfall

ABSTRACT

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah City (BPN) is a government organization specializing in land certificates services for general public. With The system currently operated is not working optimally. That can be seen from the delay in processing data. This is because BPN Kabupaten Lampung Tengah doesn't use database in its system. Besides, without the use of database can causing Double land certificate problem that's been happening in the past. Therefore, it needs a solution in its system that can overcome the problem, facilitate BPN Kabupaten Lampung Tengah in accomplishing its duties by using application program that can accelerate certificate processing services. The writer uses Science based research method on available theory and the research design in study type, whereas data collection methods were interview, observation, and literature study related to the investigated problem. The system development model used was waterfall and by structural approach method with aids such as flowmap, DFD, etc. The writer tried to propose a solution where improvement was conducted on database that facilitates BPN Kabupaten Lampung Tengah conducting land certificates processing services. This approach was in conformity with necessity in building or designing an alternative land

certificate information system Using Web and localhost server for application program. The finding of this research was alternative Land Certificate processing system that could overcome the mentioned problem by using database so that data searching process becomes easier and quicker. The data base system could also minimize user errors, and report preparation becomes more efficient and can be accessed at any time. The weakness of this research was that not online, whereas its advantage was the achievement of all stated goals and limitations.

Keywords: *Land Certificates Processing Information System, Database, Waterfall Development Model*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya besar, hal tersebut berkembang seiring pertumbuhan yang sangat pesat, berdasarkan data Badan Pusat Statistik sensus tahun 2010 diketahui bahwa pertumbuhan penduduk melebihi proyeksi nasional yaitu sebesar 237,6 juta jiwa dengan indeks pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 mencapai 1,49 %. Dengan berkembangnya jumlah pertumbuhan penduduk tentunya akan berdampak pada pola kehidupan masyarakat, salah satunya yaitu mengenai ketersediaan lahan. Bertambahnya populasi ini ternyata tidak sejalan dengan jumlah lahan untuk membangun pemukiman yang semakin minim. Tidak sedikit lahan-lahan produktif kemudian ditimbun dan dijadikan perumahan dan kawasan perkantoran. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat perkotaan kemudian memasok dari daerah pedesaan. Dengan populasi yang semakin meningkat dan kebutuhan akan tanah yang terbatas, maka diperlukan adanya pengaturan dari negara. Pengaturan yang dimaksud dalam hal ini meliputi pemilikan, penguasaan, serta pemeliharannya secara sistematis.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan UUPA pada pasal 19 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pendaftaran tanah ini menjadi kewajiban bagi Pemerintah maupun pemegang hak atas tanah. Dengan adanya ketentuan ini, maka undang-undang memberikan hak bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya tidak hanya sekedar memberikan jaminan dan kepastian hukum. Pendaftaran tanah dikonversi dalam bentuk sertifikat sebagai bukti autentik kepemilikan yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan

masyarakat, Pemberian hak atas tanah di Indonesia dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disingkat BPN-RI) dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum yang dapat mencakup secara keseluruhan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Badan Pertanahan Nasional dalam upaya mengubah pola pelayanan kepada masyarakat sebenarnya telah melakukan pelayanan berbasis komputer sejak 1997. Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) atau Land Office Computerization (LOC) dengan tujuan menciptakan tertib administrasi pertanahan, meningkatkan kualitas informasi pertanahan BPN, untuk mempermudah pemeliharaan data pertanahan, menghemat space / storage untuk penyimpanan data-data pertanahan dalam bentuk digital (paperless), meningkatkan kemampuan SDM pegawai BPN di bidang teknologi informatika / komputer, melakukan standarisasi data dan sistem informasi dalam rangka mempermudah pertukaran informasi pertanahan serta menciptakan suatu sistem informasi pertanahan yang handal.

Penelitian ini dilakukan untuk membuat sebuah sistem informasi berbasis web untuk pelayanan masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian, diharapkan dengan informasi yang berbasis web yang dapat diakses dari mana pun dan kapan pun serta tersedianya informasi yang akurat dan terkini. Sehingga masyarakat yang sedang mengajukan pelayanan di kantor pertanahan, dapat memonitoring prosesnya. Masyarakat dapat mengetahui biaya yang harus dikeluarkan dalam membuat sertifikat tanah, pemecah sertifikat atau balik nama sertifikat. Sehingga semua biaya lebih transparan. Diharapkan dengan sistem informasi berbasis web, pelayanan di kantor pertanahan kabupaten

Lampung Tengah akan menjadi lebih baik dan lebih efisien.

2. LITERATUR REVIEW

2.1 Sistem Informasi

Sistem pada dasarnya adalah sekelompok elemen yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 1989:5). Suatu sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kegiatan atau suatu prosedur/bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan atau tujuan-tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan atau energi dan atau barang. (Murdick, 1984 :16).

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. (Devis, yang diterjemahkan oleh Adiwardana 1991:28).

Dari definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem informasi adalah unsur-unsur yang ada di dalam suatu sistem yan saling terkait dan berinteraksi dalam mencapai tujuan perusahaan. Proses ini akan terjadi dalam kegiatan sehari-hari, aktifitas manajemen dan pembuatan keputusan berdasarkan analisa informasi yang ada. Hal ini menjadi penting karena setiap sistem informasi mencakup suatu sistem pengolahan data, mengklasifikasikan, menyortir, mencocokkan, mengalihkan dan membandingkan yang pada pokoknya meningkatkan kegunaan menjadi informasi dan menyajikan pada yang berkepentingan.

2.2 Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena hal itu bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Filosofi dari pelayanan publik menempatkan rakyat sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rachmadi, 2008). Sebelum mengetahui arti kinerja pegawai publik, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai organisasi publik. Organisasi publik diartikan sebagai organisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia, yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Sinambela, 2007).

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penarima pelayanan.

2.3 Kualitas Pelayanan Publik

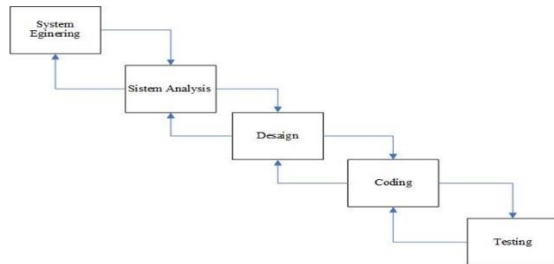
Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2001). Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono, 2007).

Kualitas pelayanan (*service quality*) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima / peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan / inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk.

Menurut Kotler (2002:83) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering.

2.4 Pengembangan Perangkat Lunak Teori Waterfall

Metode pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem ini dilakukan dengan melalui empat tahap yaitu Analisis sistem (*system Analysis*), desain sistem (*Sytem Design*), Pembuatan Program (*Coding*) dan Test Program (*Testing*).



Gambar 2.1 Paradigma Waterfall (Jogiyanto, 2001)

a. System Eginering

Merupakan bagian dari sistem yang dimulai dari pengumpulan data agar dapat diketahui elemen-elemen yang dibutuhkan dan dilokasikan dalam perangkat lunak.

b. System Analysis

Proses analisis sistem ini dimaksudkan untuk menjadi fungsi yang dibutuhkan parameter, performasi serta user interfacenya, yang hal tersebut harus dapat membutuhkan suatu domain informasi yang harus didokumentasikan.

c. Desain (Perancangan)

Pada proses desain ini, kita mengubah kebutuhan yang ada menjadi suatu bentuk karakteristik yang dimengerti perangkat lunak sebelum penulisan program.

d. Coding

Setelah desain perangkat lunak selesai digambarkan secara detail maka akan diterjemahkan kedalam msuatu bentuk yang dimengerti komputer yaitu dengan menuliskan program sesuai dengan rancangannya dengan menggunakan bahasa pemrograman.

e. Testing (Pengujian)

Setelah proses penulisan program perangkat lunak selesai, maka akan diadakan pengujian. Hal ini dilakukan untuk memeriksa apakah perangkat lunak yang dibuat telah sesuai dengan yang diharapkan dan memeriksa segala kesalahan.

3. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah ekperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016:347).

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah yang beralamat Jl. Soekarno Hatta Km. 55 Panggungan, Gunung Sugih. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan studi Pustaka.

Pembangunan sistem yang digunaaKn dalam penelitian ini adalah metode waterfall (air terjun), pemilihan metode waterfall dalam penelitian ini karena metodologi waterfall ini bahwa setiap tahapan harus selesai terlebih dahulu sebelum memasuki tahapan selanjutnya. Model ini merupakan pengembangan sistem yang dikerjakan secara terstruktur, model ini juga mengusulkan sebuah pendekatan perangkat lunak yang sistematis dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Hal ini sekiranya membuat sistem yang dikembangkan dapat terselesaikan dengan tidak terlalu rumit dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Sistem

4.1.1 Analisis Sistem Yang Berjalan

Tujuan dari pada analisa sistem yang sedang berjalan adalah untuk mengetahui bentuk permasalahan dan kelemahan sistem yang ada yang selama ini berjalan. Dengan mengetahui permasalahan tersebut diharapkan pengembangan sistem yang akan diusulkan benar - benar dapat dirancang dengan maksimal sesuai dengan permasalahan yang ada, sehingga sistem dapat berjalan dengan optimal.

Permasalahan sistem lama yang sedang berjalan merupakan dasar pengembangan sistem baru yang akan diusulkan, karena pengembangan sistem ini dilakukan karena adanya permasalahan permasalahan dari sistem

lama atau sistem yang sedang berjalan. Dengan pengembangan sistem ini diharapkan akan dapat membantu memecahkan permasalahan sistem yang sedang berjalan.

a. Pengajuan Sertifikat Baru

- 1) Pemohon membawa berkas berkas yang dibutuhkan untuk membuat sertifikat tanah ke loket.
- 2) Kemudian bagian loket akan mencatat data pemohon dan membuat surat perintah setor.
- 3) Pemohon akan membayarkan biaya pendaftaran sesuai dengan biaya yang tertera di surat perintah setor.
- 4) Setelah dilakukan pembayaran, bagian infrastruktur tanah, akan melakukan survey ke lapangan untuk mengukur dan menggambar batas batas tanah yang diajukan pemohon.
- 5) Setelah diukur, petugas akan mengisi surat ukur untuk diteruskan ke bagian hukum pertanahan untuk mendaftarkan SK pemberian hak milik.
- 6) Bagian hukum pertanahan akan memproses nomor SK dan tanggal SK serta berkas pendukungnya untuk diterbitkan sertifikat tanah. Sertifikat yang sudah dicetak, akan dikembalikan ke bagian loket, agar dapat dikonfirmasi ke pemohon untuk diambil ke kantor pertanahan.

b. Pengajuan Pecah Sertifikat

- 1) Pemohon membawa berkas berkas yang diperlukan untuk disetorkan ke loket kantor pertanahan.
- 2) Kemudian bagian loket akan mengisi data pemohon dan berkas yang dibawa serta akan menerbitkan surat perintah setor.
- 3) Pemohon akan membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk memecah sertifikasi.
- 4) Setelah membayar, loket akan membuat surat tugas yang ditujukan kepada bagian hukum pertanahan untuk dapat diproses pembuatan buku tanah dan sertifikat baru.
- 5) Bagian hukum pertanahan akan memproses dan mencetak buku tanah dan sertifikat kemudian diserahkan kembali ke loket, agar pemohon dapat mengambil buku tanah dan sertifikat tersebut.

c. Pengajuan Balik Nama Sertifikat

1. Pemohon membawa berkas berkas yang diperlukan untuk disetorkan ke loket kantor pertanahan.
2. Kemudian bagian loket akan mengisi data pemohon dan berkas yang dibawa serta akan menerbitkan surat perintah setor.
3. Pemohon akan membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk memecah sertifikasi.
4. Setelah membayar, loket akan membuat surat tugas yang ditujukan kepada bagian hukum pertanahan untuk dapat diproses pembuatan buku tanah dan sertifikat baru.
5. Bagian hukum pertanahan akan memproses dan mencetak buku tanah dan sertifikat kemudian diserahkan kembali ke loket, agar pemohon dapat mengambil buku tanah dan sertifikat tersebut.

4.1.2 Kelemahan Sistem

Masyarakat kabupaten Lampung Tengah yang ingin melakukan pembuatan sertifikat tanah, balik nama atau pecah sertifikat, harus datang langsung ke kantor pertanahan, untuk mengajukan berkasnya, masyarakat pun tidak mengetahui proses berkasnya sudah sampai di tahap mana.

4.1.3 Sistem Yang Diusulkan

Untuk memenuhi kebutuhan hardware guna menjalankan aplikasi yang telah dibuat, maka perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sistem aplikasi, teknologi aplikasi yang digunakan dapat bertahan cukup lama, performance yang baik dan harga yang relatif murah, adapun spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan:

Tabel 4.1 Spesifikasi Perangkat Keras

<u>Perangkat Keras</u>	<u>Spesifikasi</u>
Processor	Intel Core i5
RAM	4 MB
Harddisk	1 TB
Monitor	Samsung SVGA 15"
Keyboard	Standard 101 Keys
Mouse	PS/2
Printer	Canon S200SPx

Untuk melakukan pembuatan desain dan ujicoba program diperlukan perangkat lunak

guna menunjang aplikasi yang akan dibuat yang berupa:

Tabel 4.2. Spesifikasi Perangkat Lunak

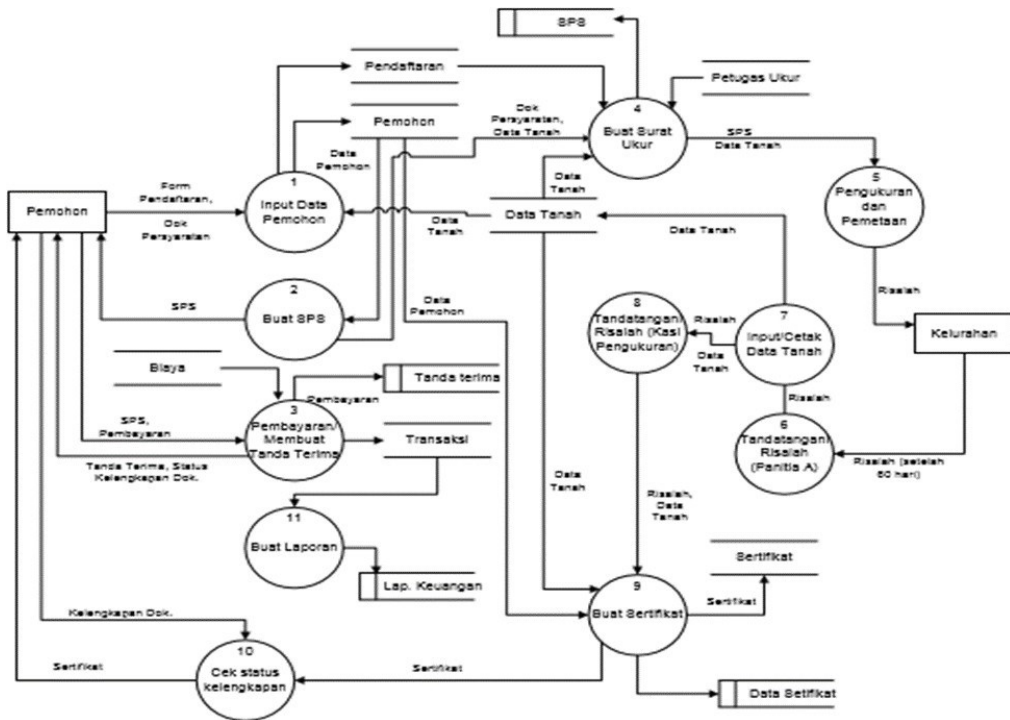
<u>Perangkat Lunak</u>	<u>Spesifikasi</u>
Sistem Operasi	Windows 10
Bahasa Pemrograman Yang digunakan	PHP, Javascript
Desain web	Macromedia Dreamweaver CS 3
Pengolahan gambar	Adobe Photoshop CS 4
Server	Apache
Datbase	MySQL – Fornt
Browsing	Chrome

DFD merupakan salah satu diagram yang menggunakan notasi-nitasi untuk menggambarkan secara grafis arus informasi dalam satu system informasi tanpa mempertimbangkan keadaan lingkungan fisik dan bagaimana informasi tersebut disimpan

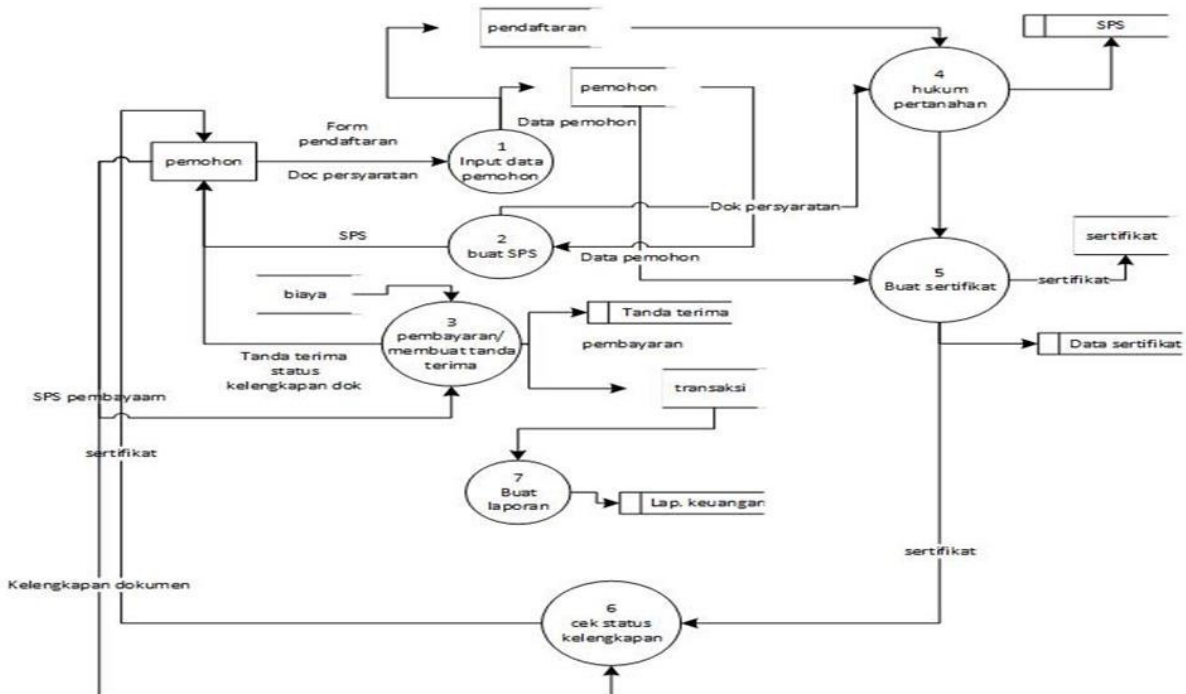
Pada tahap perancangan sistem, kamus data digunakan untuk merancang input, merancang laporan-laporan dan basis data. Kamus data yang mengalir pada *data flow diagram* sistem informasi pengelolaan sertifikat yang diusulkan penulis dapat dilihat sebagai berikut :

1. Nama Arus Data : daftar_sertifikat
Alias : -
Bentuk Data : Dokumen
Arus Data : entitas Pemohon
Proses
Penjelasan : Formulir pendaftaran hak
Struktur Data : tgl_pengajuan, nik, nama, alamat, kode_kec, kode_desa, hak, kode_boking, shgb, imb, ktp, kk, pbb, pernyataan, status, kode_biaya, nip_pegawai_validasi.
2. Nama Arus Data : pembayaran
Alias : -
Bentuk Data : Dokumen
Arus Data : entitas Pemohon
Proses 1
Penjelasan : Dokumen pembayaran
Struktur Data : nik, kode_boking, tgl_bayar, bayar

3. Nama Arus Data : Surat Perintah Ukur
Alias : Surat Ukur
Bentuk Data : Dokumen
Arus Data : Proses 4 – Proses 5
Penjelasan : Surat perintah pengukuran tanah
Struktur Data : no_survey, nip_pegawai_ukur, tgl_survey,denah, hak, nib, nomor, propinsi, kabkota, kode_kec, kode_desa, peta, lembar, kotak, no_daftar, keadaan_tanah, batas, luas, penetapan_pembatas
4. Nama Arus Data : biaya
Alias : -
Bentuk Data : Dokumen
Arus Data :
Penjelasan : daftar biaya
Struktur Data : kode_biaya, nama_biaya, biaya
5. Nama Arus Data : validasi
Alias : -
Bentuk Data : Dokumen
Arus Data :
Penjelasan : validasi data sertifikat
Struktur Data : nip_pegawai_validas nama_pegawai, tgl_validasi, hal

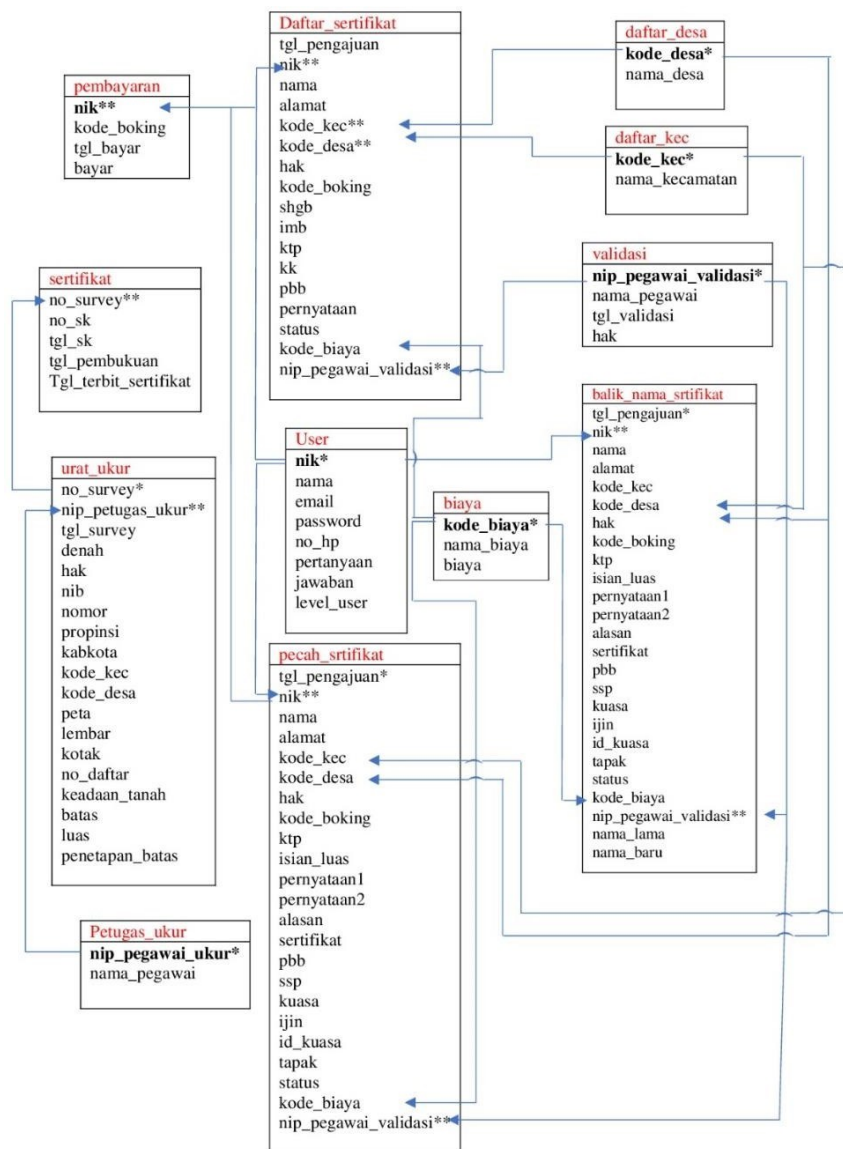


Gambar 4.1 DFD Level 1 Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat (SIPEKAT) Pembuatan Sertifikat Baru dan Pecah Sertifikat



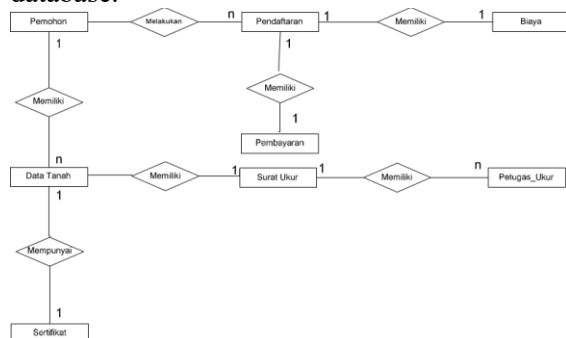
Gambar 4.2 DFD Level 1 Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat (SIPEKAT) Balik Nama Sertifikat

Adapun relasi tabel untuk Sistem Informasi Pengelolaan Sertifikat adalah :



Gambar 4.3 Relasi Antar Tabel

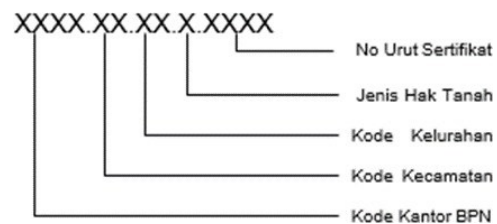
Untuk mendukung program yang dibuat maka program tersebut harus dilengkapi dengan database.



Gambar 4.4 Entity Relationship Diagram

Kemudian, kodifikasi digunakan pada program aplikasi yang berfungsi untuk menjabarkan item-item data yang bersifat unik. Adapun kodifikasi yang penulis gunakan adalah:

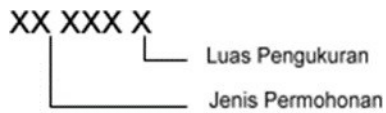
1. Nomor Sertifikat



Contoh : 1015.25.23.1.0001
1015 : kode kantor BPN Kabupaten

- Lampung Tengah
25 : kode kecamatan
23 : kode kelurahan
1 : jenis hak tanah
0001 : no urut sertifikat

2. Kode Biaya



- Contoh : DI 301 01
DI 301 : jenis permohonan
01 : Luas pengukuran tanah (01: 1
500 meter, 02 :501-1000 m dan
setertusnya)

4.2 Desain

4.2.1 Desain Halaman Pengunjung

Gambar 4.5 Rancangan Halaman Utama Pengunjung

Gambar 4.6 Desain Login Member

Gambar 4.7 Desain Form Pendaftaran

Gambar 4.8 Desain Lupa Password

4.2.2 Desain Halaman Member

Gambar 4.9 Desain Form Pendaftaran Sertifikat

Gambar 4.10 Desain Form Pembayaran Sertifikat Baru

Gambar 4.11 Desain Form Pecah Sertifikat

Gambar 4.12 Desain Form Pembayaran Pecah Sertifikat

Gambar 4.13. Desain Form Balik Nama Sertifikat

Gambar 4.14 Desain Form Pembayaran Balik Nama Sertifikat

5. KESIMPULAN

Sistem baru yang dirancang telah menggunakan program aplikasi dengan dukungan basis data sehingga proses pendaftaran, pemisahan, serta penggabungan sertifikat dapat menjadi lebih cepat. Implementasi Sistem informasi yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan yang dibutuhkan yaitu pendaftaran, pemisahan, serta penggabungan sertifikat tanah. Sistem informasi Pengelolaan Sertifikat setelah dilakukan pengujian tidak ditemui kesalahan dan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kotler, Philip. (2002). *Manajemen Pemasaran, Jilid 1, Edisi Milenium*. Jakarta: Prehullizdo Jogiyanto, HM. 2001. *Analisis Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi. (1989). *Pemrograman dengan Turbo Pascal 4.0 (1)*. Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo.
- Murdick, G, Robert, Ross, E, Joel, Clagget, R, James. (1984). *Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern 3 (3)*. Jakarta: Erlangga. Adiwardana 1991:28.
- Santoso, Tjiptono, (2001), *Riset Pemasaran Jasa, Andi Offset*, Yogyakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2007). *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implementasi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Tjiptono, Fandy. (2007). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi.
- Usman, Rachmadi. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan (Edisi Pertama)*. Jakarta: Sinar Grafika. Sinambela, Dr. Lijan Poltak. (2007). *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, kebijakan dan implementasi)*. Jakarta: Bumi Aksara.